



**POLA HUBUNGAN PRODUKSI DALAM USAHA GARAM  
RAKYAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN  
SOSIAL EKONOMI PETAMBAK GARAM DI KECAMATAN  
BATANGAN KABUPATEN PATI 1998-2014**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun oleh:**

**Maria Ulfa**

**NIM 13030113130072**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Maria ulfa, menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/ skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

**Semarang, 14 Agustus 2017**  
**Penulis,**

**Maria Ulfa**  
**NIM 13030113130072**

## ***MOTTO DAN PERSEMBAHAN***

### ***MOTTO:***

“Apabila didalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun”.

Ir. Soekarno

Dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, serta  
sahabat-sahabatku yang telah  
memberi semangat dan  
dukungan penuh.

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Disetujui,  
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si.  
NIP 19610605 198603 2 001

Skripsi dengan judul “Pola Hubungan Produksi dalam Usaha Garam Rakyat di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, 1998-2014” yang disusun oleh Maria Ulfa (13030113130072) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada tanggal 14 Agustus 2017.

Ketua,



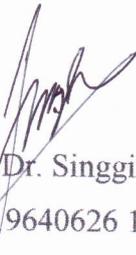
Dr. Endang Susilowati, M. A.  
NIP 19590516 198811 2 001

Anggota I,



Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si.  
NIP 19610605 198603 2 001

Anggota II,



Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.  
NIP 19640626 198903 1 003

Anggota III,



Dra. Sri Indrahti, M. Hum.  
NIP 19660215 199103 2 001

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Redyanto Noor, M. Hum.  
NIP 19590307 198603 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Hubungan Produksi dalam Usaha Garam Rakyat di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, 1998-2014”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menempuh ujian akhir Program Strata-1 di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Redyanto Noor, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan izin serta kemudahan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dra. Titiek Suliyati, M.T., selaku dosen wali yang selama ini telah memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan akademik penulis.

Selanjutnya, penulis sampaikan rasa terima kasih yang amat dalam kepada Prof. Dr. Yety Rochwulaningish, M. Si., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sangat sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Pemikiran dan gagasan-gagasan yang beliau kemukakan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga sampaikan terima kasih kepada Dr. Endang Susilowati, M.A., Prof. Dr. Singgih T.S. M, Hum., dan Dra. Sri Indrahti, M. Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Penulis juga sampaikan terima kasih kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada segenap staf administrasi Departemen

Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang maksimal.

Terima kasih pula yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis yang sangat hebat, Bapak Rasidin dan Ibu Maryati yang telah memberikan bantuan moral, material, dan spiritual sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, juga kepada Adik Mirna yang turut mendoakan demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sampaikan juga terima kasih kepada para petambak garam yang bersedia memberikan banyak informasi dan berbagi kisahnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sampaikan pula terima kasih kepada para sahabat-sahabat penulis, Wulan, Puji, Winda, Sovi, dan semua teman-teman sejarah angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas dukungan, semangat, motivasi, dan kebersamaanya selama ini. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Mas Fery yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, serta mendoakan untuk keberhasilan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak sekali kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun substansi, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini. Meski sedikit, penulis berharap semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 14 Agustus 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xiv</b>
<b>INTISARI</b>	<b>xv</b>
<b>SUMMARY</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	A. Latar Belakang dan Permasalahan 1
	B. Ruang Lingkup 6
	C. Tujuan Penelitian 9
	D. Tinjauan Pustaka 9
	E. Kerangka Pemikiran 18
	F. Metode Penelitian 21
	G. Sistematika Penulisan 23
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KECAMATAN BATANGAN 1998- 2014</b>
	A. Kondisi Geografis 25
	B. Kondisi Demografi 31
	C. Kondisi Sosial Ekonomi 34
	D. Kondisi Sosial Budaya 41
<b>BAB III</b>	<b>PERKEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT DI KECAMATAN BATANGAN 1998- 2014</b>
	A. Struktur Penguasaan Lahan Tambak 48
	B. Proses Produksi dan Implementasi PUGAR 59
	C. Tata Niaga Garam Rakyat 69

<b>BAB IV</b>	<b>POLA HUBUNGAN PRODUKSI DALAM USAHA GARAM RAKYAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PETAMBAK GARAM DI KECAMATAN BATANGAN 1998-2014</b>	
	A. Sistem Bagi Hasil	75
	B. Surplus Pemilik Modal	83
	C. Kemiskinan Penggarap	93
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN</b>	98
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	100
	<b>DAFTAR INFORMAN</b>	104
	<b>LAMPIRAN</b>	106

## DAFTAR SINGKATAN

ASINIRAYA	: Asosiasi Petambak Garam Rakyat Jawa Tengah
Be	: Boume
BBM	: Bahan Bakar Minyak
DAS	: Daerah Aliran Sungai
HPP	: Harga Penetapan Pemerintah
Mpdl	: Meter diatas Permukaan Laut
NaCl	: <i>Natrium Clorida</i>
PERRAS	: Paguyuban Petani Garam Sumenep
PNPM KP PUGAR	:Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Usaha Garam rakyat
P2KP	:Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PUGAR	: Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
CSR	: <i>Cooperate Social Responsibility</i>
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
TUF	: Teknologi Ulir Filter
UPG	: Unit Pengelolaan Garam

## DAFTAR ISTILAH

<i>Accessibility</i>	: kemampuan untuk mengakses
<i>Archipelago state</i>	: negara kepulauan
Arko	: alat untuk mengangkat garam dari tambak ke gudang penyimpanan/ pondok garam
<i>Banca'an</i>	: makan berkat bersama-sama
<i>Barzanji</i>	: suatu doa, pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad Saw yang dilafalkan dengan suatu irama
<i>Berkat</i>	: makanan yang dibagikan sebagai bentuk rasa syukur
<i>Client</i>	: seseorang yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah dalam hubungan kerja dan mengabdikan kepada atasannya
<i>Danyang</i>	: leluhur desa
<i>Depo</i>	: tempat penyimpanan garam
Disel	: mesin pemicu kompresi
<i>Ebor</i>	: alat tradisional untuk menyirami lahan garam dengan air laut untuk proses pengkristalan
<i>Galeng</i>	: persiapan lahan dalam proses produksi garam
Garam briket	: garam yang berasal dari garam krosok yang diolah dan dicetak menjadi kotak-kotakan
Garam krosok	: garam yang berasal dari tambak yang belum diolah
<i>Geoisolator</i>	: suatu teknik dalam proses produksi garam dengan cara memasang terpal di lahan garam sehingga mampu menghasilkan garam dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi
<i>geomembran</i>	: sebutan lain untuk geoisolator
<i>Istighosah</i>	: doa bersama
<i>Jambean</i>	: lomba panjat pinang
<i>Ketep</i>	: tepian laut
Kitab kuning	: kitab-kitab tradisional yang berisi mengenai ajaran islam
<i>Kowenan</i>	: petakan-petakan tambak
<i>Maleman</i>	: doa bersama di malam hari menjelang acara sedekah laut dan sedekah bumi
<i>Manaqiban</i>	: kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dengan cara pembacaan manaqib (biografi) dari Syaikh Abdul Qodir Jailani

<i>Maro</i>	: bagi hasil sama rata
<i>Maulid Nabi</i>	: peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Saw
<i>Mocok tandur</i>	: buruh menanam padi
<i>Ngangkut</i>	: mengangkut garam dari pondok ke tempat penjualan garam
<i>Ngedos</i>	: panen padi
<i>Nggaruk</i>	: mengumpulkan garam di mejan garam dengan alat garuk ketika garam sudah tiba masa panen
<i>Nggolok</i>	: mengangkut garam dari truk/ bongkar garam
<i>Nyadran</i>	: kegiatan menaiki perahu secara bersama-sama menuju suatu pulau dan berdoa untuk hasil laut yang berlimpah
<i>Owner</i>	: Pemilik
<i>Patron</i>	: seseorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam hubungan kerja dan berkewajiban memberikan perlindungan kepada bawahannya
<i>Patron client</i>	: suatu hubungan antara dua pihak yang mempunyai ketergantungan sosial
<i>Sedekah bumi</i>	: syukuran atas hasil bumi
<i>Sedekah laut</i>	: syukuran atas hasil laut
<i>Selender</i>	: alat tradisional untuk meratakan lahan garam
<i>Stakeholder</i>	: pemangku kepentingan
<i>statement</i>	: Pernyataan
<i>Tahlilan</i>	: kegiatan keagamaan yang diadakan setelah meninggalnya seseorang dengan cara mendoakan dan memohonkan ampun atas dosa-dosa almarhum
<i>Tambak ndhuwur</i>	: tambak yang telaknya dekat dengan laut
<i>Tambak ngisor</i>	: tambak yang letaknya dekat dengan pemukiman warga
<i>Tambak suwunan</i>	: tambak yang dimiliki oleh seseorang berasal dari pembuatan lahan baru
<i>Tambak tengahan</i>	: tambak yang letaknya ditengah-tengah (diantara tambak ndhuwur dan tambak ngisor)
<i>Tambak tukon</i>	: tambak yang kepemilikannya melalui hasil jual beli
<i>Tambak warisan</i>	: tambak yang kepemilikannya berasal dari warisan orang tua atau kerabat
<i>Tingkeban</i>	: upacara yang dilaksanakan pada bulan ketujuh kehamilan sebagai bentuk doa untuk keselamatan ibu dan anak
<i>Titiran</i>	: kincir angin
<i>Ziarah makam</i>	: mengunjungi makam/ kubur

## DAFTAR TABEL

Tabel:		halaman
2.1	Ketinggian Desa diukur dari Permukaan Laut di Kecamatan Batangan 1998	26
2.2	Daerah Aliran Sungai di kecamatan Batangan	28
2.3	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan tiap bulan di kecamatan Batangan Keadaan tahun 1998-2014	29
2.4	Luas Lahan dan Presentase penggunaan Lahan Sawah dan Lahan bukan Sawah di Kecamatan Batangan 1998-2014	30
2.5	Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Batangan 1998-2014	32
2.6	Jumlah Penduduk di Wilayah Pesisir Kecamatan Batangan 1998-2014	33
2.7	Luas Lahan Sawah dan Lahan Tambak Menurut Penggunaannya tiap Desa di kecamatan Batangan 2014	35
2.8	Jumlah Keluarga Prasejahtera di Kecamatan Batangan 1998-2014	40
2.9	Jumlah pemeluk Agama di Desa Pesisir di Kecamatan Batangan 1998-2014	42
2.10	Sarana Peribadatan di Desa Pesisir di Kecamatan Batangan 1998-2014	44
2.11	Tingkat Pendidikan penduduk Pesisir di Kecamatan Batangan 1998-2014	45
3.1	Jumlah Petambak Lahan Luas di Desa Pesisir Kecamatan Batangan 1998-2014	52
3.2	Jumlah Petambak Lahan Sempit di Desa Pesisir Kecamatan Batangan 1998-2014	55
3.3	Jumlah Petambak Penggarap Bagi Hasil/ Buruh di Desa pesisir Kecamatan Batangan 1998-2014	58
3.4	Luas Lahan tambak di Desa Pesisir Kecamatan Batangan tahun 2014	60
3.5	Jumlah Produksi Garam di Desa Pesisir Kecamatan Batangan 2011-2014	62

## INTISARI

Melalui metode sejarah yang mencakup tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, skripsi ini mengkaji pola hubungan produksi dalam usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati pada tahun 1998-2014. Secara khusus permasalahan yang dikaji adalah pola hubungan yang terjalin antara pelaku usaha garam yang direkonstruksi melalui konsep ketergantungan sosial, eksploitasi, dan kemiskinan, serta menggunakan pendekatan sosial ekonomi.

Pada tahun 1998 jumlah petambak lahan luas sebanyak 241 orang, petambak lahan sempit sebanyak 833 orang, dan penggarap bagi hasil sebanyak 1.250 orang. Pada tahun 2014 jumlah tersebut mengalami perubahan yakni jumlah petambak lahan luas sebanyak 298 orang, petambak lahan sempit sebanyak 873 orang, dan penggarap bagi hasil sebanyak 1466 orang. Pola hubungan produksi antara pemilik lahan (majikan) dan penggarap (buruh) diawali dengan adanya ketergantungan sosial di antara mereka. Meskipun didasari prinsip saling membutuhkan, namun kenyataannya hubungan yang terjadi di antara kedua pihak itu sebenarnya tidak setara dan cenderung hanya menguntungkan pemilik lahan luas. Hubungan produksi tersebut menjadikan pemilik lahan luas semakin kaya dan penggarap bagi hasil semakin miskin dan terbelakang. Hal itu dikarenakan adanya praktek eksploitasi dalam hubungan produksi usaha garam rakyat. Disadari atau tidak, pemilik lahan luas seringkali mengambil banyak keuntungan atas kerugian penggarap bagi hasil sehingga penggarap bagi hasil semakin hidup dalam kemiskinan.

Saat terjadi krisis moneter tahun 1998 pemilik lahan luaslah yang umumnya mendapatkan keuntungan berlipat akibat kenaikan harga garam yang begitu tinggi. Pada tahun 2014 ketika ada bantuan dari pemerintah terkait penerapan *geoisolator* dalam produksi garam, banyak pemilik lahan luas di beberapa desa yang menarik keuntungan atas bantuan tersebut, yakni dengan mewajibkan penggarap bagi hasil untuk membeli bantuan terpal jika ingin menerapkan teknologi *geoisolator*. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan penggarap bagi hasil semakin meningkat, baik ketika krisis moneter tahun 1998 maupun ketika ada bantuan *geoisolator*.

## SUMMARY

Through historical method that includes heuristic phase, source critic, interpretation, and historiography, this thesis examines the pattern of production relationships of the people salt business in Batangan sub-district, Pati regency in 1998-2014. Specifically, the problem studied is the pattern of relationships that exist between salt business actors reconstructed through the concept of social dependence, exploitation, and poverty, and using socio-economic approach.

Salt business in Batangan sub-district with land tenure structure, in 1998 the number of large land farmers were 241 people, the number of narrow land farmers were 833 people, and the shareholders were 1,250 people. In 2014, the number has changed, namely the number of large land farmers were 298 people, narrow land farmers were 873 people, and shareholders were 1466 people. This relationship between the landowners (employer) and the shareholder (laborers) with the social dependence of them. Although, it is based on the principle of mutual need, but in reality the relationship that occurs between the two parties is actually not equivalent and tend to only benefit large landowners. These production relationships make the large landowners richer and the shareholders become poorer and underdeveloped. This is because of the exploitive practices in the relation of production of people salt business. Whether or not they realize it, large landowners often take a lot of advantages over the loss of shareholders production so that the shareholders grow more and more in poverty.

In the wake of the monetary crisis in 1998 the large landowners who generally benefited more than the high salt price increases. In 2014 when there is government assistance related to the application of geoisolators in salt production, many large landowners in some villages are benefiting from the assistance, by requiring shareholders to buy tarpaulins if they want to apply geoisolator technology. Therefore, the poverty rate of the production shareholders is increasing, both when the monetary crisis of 1998 and when there is aid of geoisolator.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Garam merupakan salah satu komoditi strategis dan penting, karena digunakan sebagai bahan baku industri dan bahan pangan yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Sering terdengar *statement* yang mengatakan sumber daya laut itu penting, termasuk garam yang memanfaatkan air laut. Namun dalam prakteknya usaha garam rakyat masih ditempatkan pada posisi belakang, sehingga kesejahteraan petambak garam terabaikan, terlebih petambak garam yang berstatus sebagai penggarap bagi hasil.<sup>1</sup>

Pendapatan petambak garam khususnya petambak kecil dan penggarap yang secara langsung membuat garam, secara umum masih tergolong sangat minim dikarenakan persoalan otoritas atas produk pasca panen dan harga garam yang selalu lebih menguntungkan orang-orang yang memiliki modal, sehingga cenderung merugikan petambak pembuat garam. Di sisi lain tengkulak ataupun makelar dapat menikmati keuntungan maksimal karena garam dapat dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi. Pada umumnya mereka telah memiliki jaringan pasar dan ikut menentukan harga.<sup>2</sup>

Hasil laporan menunjukkan, Indonesia pada masa kolonial mampu mengekspor garam ke luar negeri. Pada tahun 1938, Jawa Tengah mampu mengekspor garam sebanyak 2.882.000 kg. Produksi ini melibatkan 6 sentra perusahaan garam di Jawa Tengah, yaitu Rembang, Pati, Jepara, Demak, Semarang, dan Brebes,<sup>3</sup> namun sekarang kondisi Indonesia terbalik menjadi

---

<sup>1</sup>Yety Rochwulaningsih, *Marjinalisasi Garam Rakyat* (Semarang: CV. Madina, 2013), hlm. 1.

<sup>2</sup>Hal tersebut juga terjadi di daerah sentra penghasil garam lainnya. Lihat Setyo Budi, "Melongok Petani Garam Pamekasan", *Pati Bumi Mina Tani*, Edisi 40 tahun 2006.

<sup>3</sup>Yety Rochwulaningsih, *Marjinalisasi Garam Rakyat*, hlm. 93.

negara pengimpor garam yang dari waktu ke waktu jumlahnya terus meningkat. Peningkatan impor garam pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat dengan jelas pada data berikut: pada tahun 2007 impor garam sebesar 1,6 juta ton dari total kebutuhan garam nasional sebesar 2,5 juta ton. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 1,8 juta ton dari 2,7 juta ton total kebutuhan garam nasional. Pada tahun 2013, angka itu meningkat lagi menjadi 2,2 juta ton dari total kebutuhan garam nasional 3,3 juta ton.<sup>4</sup> Jika hal tersebut tetap dibiarkan, maka nasib petambak garam di Indonesia akan semakin terpinggirkan, terlebih petambak yang berstatus sebagai petambak kecil dan penggarap bagi hasil. Kondisi tersebut menjadi keprihatinan berbagai pihak dan oleh karenanya Asosiasi Petambak Garam Rakyat Jawa Tengah (Asiniraya) pernah mendesak pemerintah dan gubernur Jawa Tengah, untuk menghentikan impor garam terutama yang masuk wilayah Jawa Tengah karena telah merusak tatanan pasar, sehingga petambak garam dalam posisi yang sangat lemah.<sup>5</sup> Pada kenyataannya, semakin banyak jumlah garam impor, maka garam lokal menjadi menumpuk sehingga harga yang ditentukan oleh para tengkulak untuk garam lokal sangat rendah. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya pendapatan petambak garam, sehingga mereka selalu dalam kondisi yang amat miskin.

Keputusan pemerintah untuk mendatangkan garam impor cukup beralasan, karena memang garam rakyat masih dipandang dengan sebelah mata oleh sebagian kalangan pengusaha atau perusahaan pengolah garam sebagai bahan baku. Mengenai pemasaran garam rakyat di kalangan industri yang merupakan mayoritas kebutuhan garam nasional misalnya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi yang pada umumnya mengacu pada kualitas garam. Petambak garam Indonesia pada umumnya belum dapat memproduksi garam dengan kualitas baik, sehingga Indonesia juga belum dapat memenuhi kebutuhan garam industri, dan

---

<sup>4</sup>Yety Rochwulaningsih, "Instrumen Sosial Budaya Dalam Industrialisasi Garam Rakyat" (Makalah dalam Lokakarya Nasional Indonesia Menyongsong Swasembada Garam Industri 2015 yang diselenggarakan oleh DRPM-UI dan HAGI, Jakarta, 2013), hlm. 2.

<sup>5</sup>Yety Rochwulaningsih, *Marjinalisasi Garam Rakyat*, hlm. 10.

oleh karena itu dalam memasok kebutuhan garam industri pemerintah harus mengimpor. Biasanya petambak garam lokal memproduksi garam yang mempunyai kadar NaCl di bawah 90%. Sementara itu garam yang dibutuhkan oleh industri maupun rumah tangga adalah garam dengan kadar NaCl 94-97%.<sup>6</sup>

Potensi sumber daya garam di Indonesia sebagai komoditas strategis belum mampu meningkatkan kesejahteraan petambak garam, terutama petambak dengan lahan sempit dan petambak penggarap. Salah satu isu sentral penyebab rendahnya pendapatan petambak garam adalah pola hubungan produksi dan struktur penguasaan lahan tambak. Petambak garam hanya dijadikan tenaga upahan dan lahan dikuasai pemodal. Hal ini menghilangkan kesempatan petambak garam sebagai pengusaha.<sup>7</sup> Pola hubungan produksi pemilik-penggarap tampak sangat hierarkis dan meskipun secara ekonomi juga terkesan eksploitatif, relatif tidak ada resistensi secara terbuka yang dilakukan oleh petambak garam.<sup>8</sup> Selain itu, struktur penguasaan lahan tambak akan menentukan *accessibility* petambak pada surplus atas produksinya. Artinya, petambak lahan sempit dan petambak yang tidak menguasai lahan tambak, aksesnya rendah bahkan tidak memiliki akses pada surplus dari produksinya, dan sebaliknya petambak yang menguasai lahan luas memiliki akses untuk dapat menikmati surplus dari produksi pertambakan.<sup>9</sup>

Kabupaten Pati termasuk salah satu wilayah sentra penghasil garam di Indonesia. Kabupaten Pati merupakan wilayah agraris dan wilayah pesisir yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan petambak garam maupun petambak ikan. Adapun kecamatan yang menjadi sentra produksi garam adalah Kecamatan Batangan, Kecamatan Juwana, Kecamatan

---

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 tahun 2008, “Garam Konsumsi Beryodium”, (Pati : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2008).

<sup>7</sup>Mohammad Anas, “Ubah Pola Pikir Petani”, *Suara Merdeka*, 11 Desember 2014.

<sup>8</sup>Yety Rochwulaningsih, *Marjinalisasi Garam Rakyat*, hlm. 68.

<sup>9</sup>Eka Widodo, “Struktur Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Tambak di Desa Lengkong, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati tahun 2003-2011” (Skripsi pada Jurusan Sejarah FIB Undip, 2014), hlm. 57.

Wedarijaksa, dan Kecamatan Trangkil. Kecamatan Batangan merupakan penghasil garam terbesar di antara empat kecamatan tersebut. Produksi garam di Kecamatan Batangan tersebar di beberapa desa, di antaranya Desa Pecangaan, Desa Mangunlegi, Desa Lengkong, Desa Jembangan, Desa Bumimulyo, Desa Ketitangwetan, dan Desa Raci.<sup>10</sup>

Masalah mendasar bagi sebagian besar petambak garam di Kecamatan Batangan adalah struktur penguasaan lahan tambak garam yang cenderung dikuasai oleh sebagian kecil petambak.<sup>11</sup> Struktur penguasaan lahan tersebut dalam banyak kelompok menciptakan pola hubungan produksi dengan sistem bagi hasil di antara petambak garam pemilik lahan dengan petambak garam penggarap. Sistem bagi hasil ini menjadi ciri yang dominan dalam komunitas petambak garam di Kecamatan Batangan. Pada tahun 1998, terdapat 241 pemilik lahan luas dengan jumlah penggarap 1.250 orang, kemudian pada tahun 2014 jumlah tersebut meningkat menjadi 298 pemilik lahan luas dengan 1.466 penggarap.<sup>12</sup> Jumlah petambak garam berdasarkan status petambak setiap tahun berubah-ubah dikarenakan beberapa hal, yakni pewarisan tambak dan jual beli tambak. Selain itu banyak pemuda desa yang sebelumnya merantau kemudian kembali ke desa dan menjadi petambak garam, baik sebagai pemilik lahan maupun penggarap.

Suatu kondisi yang ironis, bahwa usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan memiliki kecenderungan lebih menguntungkan petambak pemilik lahan, sedangkan penggarap merupakan pihak yang paling kecil memperoleh keuntungan. Dalam sistem bagi hasil, sudah semestinya terdapat persamaan mengenai pendapatan yang diterima pemilik lahan dan penggarap, yaitu 50:50. Namun dalam prakteknya, sistem bagi hasil tersebut tidak diterapkan sebagaimana

---

<sup>10</sup>Sutaryadi, "Kegiatan PUGAR Kabupaten Pati tahun 2014" (Makalah dalam Diskusi kebijakan PUGAR di Kabupaten Pati 2014 yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati).

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ali, tanggal 22 Januari 2017. Ia merupakan petambak pemilik lahan sempit di Desa Jembangan.

<sup>12</sup>Disarikan dari berbagai sumber: Data petambak garam dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, data kelompok tani tiap desa, dan wawancara dengan petambak garam di Kecamatan Batangan.

mestinya, sehingga timbul kecenderungan pemilik lahan lebih kaya dan penggarap tetap miskin. Penggarap sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pembuatan garam justru tidak mendapatkan imbalan yang sesuai.

Tahun 2014 produksi garam di Kecamatan Batangan sebesar 183.060 ton.<sup>13</sup> Jumlah tersebut adalah yang paling tinggi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Harga garam dari petambak senilai Rp.500,- untuk garam yang putih, dan Rp 400,- untuk garam yang kurang putih. Petambak garam merasa bahwa harga tersebut masih sangat rendah, tidak sesuai dengan modal dan tenaga yang dikeluarkan petambak garam.<sup>14</sup> Harga yang rendah tersebut menyulitkan petambak garam dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga tidak jarang petambak penggarap harus meminjam uang, baik kepada pemilik lahan, kerabat, atau kepada tengkulak.<sup>15</sup>

Pola hubungan produksi antara pemilik lahan dan penggarap, serta petambak kecil dengan tengkulak menjadi suatu persoalan tersendiri. Dikarenakan kelemahan yang dimiliki sebagian besar petambak (petambak kecil dan petambak penggarap), mereka tidak bisa menghindari adanya kondisi sosial yang tanpa atau disadari menjeratnya ke dalam lingkaran kemiskinan. ketergantungan sosial ini sudah mengakar kuat pada masyarakat petambak garam.

Kondisi petambak garam di Kabupaten Pati termasuk di Kecamatan Batangan memang cukup memprihatinkan. Berbagai masalah terjadi sehingga nasib petambak garam semakin terpuruk. Persoalan-persoalan tersebut di antaranya adalah ketergantungan petambak penggarap kepada pemilik lahan, rendahnya harga garam yang ditentukan oleh tengkulak atau makelar, persaingan dengan garam impor, serta implementasi bantuan PUGAR yang kurang tepat sasaran, sehingga sangat merugikan petambak garam.

---

<sup>13</sup>*Data Garam Kabupaten Pati tahun 2014* (Pati: Dinas Kelautan dan perikanan, 2014).

<sup>14</sup>Wawancara dengan Rasidin, tanggal 15 Januari 2017. Ia merupakan penggarap bagi hasil di Desa Lengkong.

<sup>15</sup>Wawancara dengan panggih, tanggal 5 Maret 2017. Ia merupakan penggarap bagi hasil di Desa Bumimulyo.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun 1998-2014?
2. Bagaimana pola hubungan produksi dalam usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati 1998-2014?
3. Bagaimana pengaruh pola hubungan produksi dalam usaha garam rakyat terhadap kehidupan sosial ekonomi petambak garam di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun 1998-2014?

## **B. Ruang Lingkup**

Pembahasan dalam suatu karya ilmiah mutlak memerlukan ruang lingkup, mengingat luasnya masalah dalam kehidupan masyarakat. Setiap penulisan sejarah dituntut untuk menentukan batas-batas dari topik yang dibahas agar dapat diperoleh suatu kejelasan pemahaman. Permasalahan yang ada sewajarnya dibatasi sesuai topik yang diangkat.

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan. Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah menjadikan penelitian lebih mudah untuk dilakukan secara empiris, metodologis, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup> Ruang lingkup penelitian juga dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan obyek penelitian yang mencakup lingkup spasial, lingkup temporal dan lingkup keilmuan.

Ruang lingkup spasial dalam penelitian sejarah mutlak diperlukan agar penulisan sejarah dapat lebih mendalam guna mengungkapkan kejadian yang dekat dengan lingkungan mereka.<sup>17</sup> Ruang lingkup spasial merupakan batasan wilayah yang ditinjau dari segi geografis atau administrasi lainnya. Ruang lingkup

---

<sup>16</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 19.

<sup>17</sup>Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sejarah* (Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 1970), hlm. 45.

spasial penelitian ini adalah Kecamatan Batangan. Alasan dari penentuan lingkup spasial tersebut adalah Kecamatan Batangan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pati yang menjadi sentra garam terbesar di Kabupaten Pati. Sebagai sentra garam terbesar semestinya Kecamatan Batangan mampu memenuhi kebutuhan garamnya. Namun pada kenyataannya masih banyak pabrik pengolah garam di kecamatan tersebut yang mendatangkan garam dari luar negeri yang menyebabkan petambak garam semakin terpinggirkan.<sup>18</sup>

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Pembatasan lingkup temporal ini bertujuan agar penulis lebih fokus dalam melakukan penelitian, sehingga tidak melewati tahun yang telah ditetapkan. Penulis mengambil periode 1998 sampai 2014. Lingkup temporal diawali pada 1998, karena tahun 1998 merupakan tahun ketika Indonesia mengalami krisis moneter. Pada tahun tersebut terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga mengakibatkan kesulitan ekonomi pada masyarakat terutama masyarakat kelas bawah. Namun demikian, ternyata harga garam di Kecamatan Batangan pada saat terjadi krisis moneter juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga garam tidak hanya dikarenakan krisis moneter, tetapi juga dikarenakan terjadi musim kemarau basah pada tahun 1997-1998, sehingga harga garam mengalami kenaikan berlipat. Sebelum terjadi krisis moneter, harga garam pada tahun 1997 juga sudah mengalami kenaikan akibat musim kemarau basah, yakni dari Rp.25,- per kilogram menjadi Rp.400,- per kilogram. Kemudian harga garam meningkat lagi pada tahun 1998 akibat krisis moneter, yakni menjadi Rp.500,- sampai Rp.600 per kilogram. Peristiwa ini sangat menguntungkan petambak pemilik lahan luas karena pada umumnya golongan ini mempunyai stok garam yang cukup banyak, sehingga kenaikan harga garam ini dimanfaatkan oleh golongan ini untuk menjual semua garam yang telah mereka timbun. Kasus ini tercermin dari petambak pemilik lahan luas, yaitu Haji Asmuri. Sebelum krisis moneter ia telah menimbun garam dari hasil pembelian garam milik penggarap-penggarap dan petambak lahan sempit dengan harga Rp. 25,- per kilogram, dan dijual pada saat krisis

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Ali, tanggal 22 Januari 2017.

moneter berlangsung dengan harga Rp.500,- per kilogram, sehingga ia mendapatkan keuntungan yang cukup banyak, bahkan hasil penjualan garam tersebut dapat ia gunakan untuk berangkat haji.<sup>19</sup>

Kenaikan harga garam juga dirasakan oleh petambak lahan sempit dan petambak penggarap. Dengan meningkatnya harga garam, mereka yang mempunyai stok garam bisa menjual pada saat krisis moneter, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan digunakan untuk membayar hutang kepada pemilik lahan ataupun tengkulak. Dengan demikian, pada saat krisis moneter ketergantungan petambak penggarap kepada pemilik lahan bisa berkurang. Namun untuk penggarap yang tidak mempunyai stok garam, mereka justru semakin sering melakukan pinjaman kepada pemilik lahan, dikarenakan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.<sup>20</sup> Jadi pada masa krisis tersebut juga masih ditemui ketergantungan petambak penggarap kepada petambak pemilik lahan maupun tengkulak. Dengan pemilihan temporal tahun 1998, dapat diketahui lebih mendalam mengenai pola hubungan produksi antara penggarap dengan pemilik lahan pada saat krisis moneter berlangsung.

Tahun 2014 dijadikan batasan akhir penelitian ini dengan alasan pada tahun tersebut telah diterapkannya bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yaitu berupa *geoisolator* melalui PUGAR bagi petambak garam di seluruh Indonesia. Bantuan *geoisolator* tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan usaha garam rakyat, karena *geoisolator* mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pula taraf hidup petambak garam. Akan tetapi di beberapa desa di Kecamatan Batangan justru bantuan *geoisolator* menimbulkan berbagai konflik. Hal ini dikarenakan penerimaan bantuan *geoisolator* tidak tepat sasaran. Hanya sedikit petambak penggarap dan petambak garam kecil yang menerima bantuan *geoisolator*,<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Panggih, tanggal 5 Maret 2017. Ia merupakan kerabat dekat H.Asmuri.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Panggih, tanggal 5 Maret 2017.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Wanto, pada 17 April 2017.

sehingga mereka tidak bisa menghasilkan garam dengan kualitas dan kuantitas yang bagus seperti yang diharapkan pemerintah melalui program tersebut. Bantuan *geoisolator* justru diberikan kepada pihak-pihak yang mempunyai kedekatan dengan perangkat desa yang mana sebagian besar dari mereka merupakan pemilik lahan luas. Hal tersebut menjadi salah satu cara untuk mengetahui bagaimana pola hubungan produksi petambak penggarap dengan pemilik lahan terkait penerimaan bantuan PUGAR.

Penelitian ini masuk dalam kategori sejarah sosial ekonomi, karena usaha garam rakyat sangat berkaitan dengan sumber nafkah atau mata pencaharian hidup yang berarti menyangkut aktivitas produktif suatu komunitas, yaitu petambak garam. Aktivitas produksi dalam usaha garam rakyat akan menentukan sejauh mana petambak garam terutama petambak kecil dan penggarap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, perbedaan keuntungan yang sangat mencolok antara pemilik-penggarap menjadi salah satu fokus studi ini.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

Pertama, mengungkapkkan bagaimana perkembangan usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dari tahun 1998 sampai tahun 2014. Apakah dalam rentang waktu tersebut ada perubahan-perubahan dalam usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Kedua, mengetahui bagaimana pola hubungan produksi dalam usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Ketiga, mengetahui bagaimana pengaruh pola hubungan produksi terhadap kehidupan sosial ekonomi petambak garam di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka sangat berguna dalam penulisan, yaitu untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti, menegaskan kerangka teoritis yang akan disajikan dalam landasan pemikiran, untuk mempertajam konsep-konsep yang digunakan, dan untuk menghindari pengulangan dari suatu

penelitian.<sup>22</sup> Pustaka yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari buku-buku atau penelitian yang berkaitan dengan tema penulisan.

Karya pertama berjudul *Marjinalisasi Garam Rakyat*.<sup>23</sup> Penulisan buku ini merupakan salah satu usaha untuk mengungkap kecarut-marutan usaha garam rakyat yang selama ini telah membuat petambak garam semakin terpuruk dan termarginalkan, khususnya di Kabupaten Rembang. Namun tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di daerah lain penghasil garam di Indonesia. Buku tersebut juga membahas mengenai faktor internal yang berpengaruh secara signifikan terhadap marjinalisasi garam rakyat adalah struktur penguasaan lahan tambak. Dalam proses produksi garam, lahan merupakan alat produksi yang sangat penting bagi petambak garam karena di atas lahan itulah kegiatan produksi mereka dilakukan. Oleh karena itu, struktur penguasaan lahan garam akan menentukan *accessibility* petambak garam pada surplus atas produksinya. Struktur penguasaan lahan juga berpengaruh pada moda produksi yang berkembang, yaitu moda produksi kapitalis pada petambak garam lahan luas dan moda produksi non kapitalis/ yang merupakan usaha keluarga pada petambak garam kecil dan petambak penggarap bagi hasil.

Secara sosial ekonomi, petambak garam yang menguasai lahan tambak terlebih lahan yang luas relatif lebih diuntungkan, dan oleh karena itu pada umumnya mereka lebih kaya. Hal itu berbanding terbalik dengan petambak lahan sempit, lebih-lebih petambak penggarap/ buruh pembuat garam yang cenderung dieksploitasi, sehingga pada umumnya lebih terbelakang dan dalam kubangan kemiskinan. Tidak hanya itu, buku ini juga menceritakan mengenai problematika petambak garam antara lain tertutupnya akses pemilik lahan sempit terhadap pasar, karena pada umumnya petambak kecil dan penggarap bagi hasil hanya ditempatkan sebagai produsen garam. Marjinalisasi petambak garam telah berlangsung dalam rentang sejarah yang panjang. Hubungan di antara petambak

---

<sup>22</sup>Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), hlm. 19.

<sup>23</sup>Rochwulaningsih, *Marjinalisasi Garam Rakyat* (Semarang: CV. Madina, 2012).

garam dan penguasa dalam sistem tradisional itu berlangsung relatif baik saling menguntungkan, saling ketergantungan yang mencerminkan pola *patron client relationship*. Pola hubungan penguasa-kawulo (petambak garam) itu memang tampak sangat hierarkis dan meskipun secara ekonomis juga terkesan eksploitatif, relatif tidak ada resistensi secara terbuka yang dilakukan oleh petambak garam. Hal itu barangkali disebabkan oleh tidak dilakukannya sistem monopoli oleh penguasa, hanya semacam bagi hasil yang tidak melampaui batas subsistensi petambak dan juga adanya sistem sosial dan kultural yang menyebabkan petambak garam memiliki kepatuhan dan rasa bakti (loyal) pada penguasa.

Buku tersebut relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Bahkan sebagian besar petambak garam di Kecamatan Batangan berstatus sebagai petambak lahan sempit dan penggarap bagi hasil yang semakin terpinggirkan. Buku tersebut mengungkap mengenai terpinggirnya penggarap akibat penguasaan lahan yang hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, sedangkan penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini lebih berfokus mengenai pola hubungan produksi pada usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan 1998- 2014, sehingga mampu mengungkap bagaimana kondisi sosial ekonomi petambak garam, terlebih petambak penggarap bagi hasil dan petambak lahan sempit yang selalu berada di posisi bawah karena hanya ditempatkan sebagai produsen, sehingga mendapat keuntungan yang sangat sedikit sekali dalam produksi garam. Oleh karena itu buku ini sangat relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pustaka ke dua yaitu tesis karya Hariyanto yang berjudul “Implementasi Program Penyaluran Dana PNPM KP PUGAR (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2011-2012”.<sup>24</sup> Dalam tesis ini mengungkap bagaimana pelaksanaan program PUGAR di Desa Asempapan. Pelaksanaan PUGAR dilakukan kepada para

---

<sup>24</sup>Haryanto, “Implementasi Program Penyaluran Dana PNPM KP PUGAR (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2011-2012” (Tesis pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang, 2013).

petambak garam yang selama ini kurang mendapat perhatian melalui kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Permasalahan yang nampak pada usaha garam rakyat di Desa Asempapan yaitu 1) mengenai lemahnya posisi tawar para petambak garam rakyat, 2) isu permodalan yang menyebabkan para petambak garam masih belum optimal dalam mengakses sumber permodalan baik dari Bank maupun non Bank sehingga petambak garam rakyat terjatuh pada bakul, tengkulak dan juragan, 3) isu regulasi yang menyebabkan lemahnya keberpihakan dan proteksi pemerintah pada sektor garam, sehingga usaha garam rakyat menjadi tidak protektif dan marketable, dan 4) isu tata niaga garam rakyat yang sangat liberalistik dengan tidak adanya penerapan standar kualitas dan harga dasar garam rakyat, sehingga terjadi deviasi harga yang sangat tinggi di tingkat produsen petambak garam dan pelaku pasar, serta terjadi penguasaan kartel perdagangan ditingkat lokal.

Tesis tersebut juga menyebutkan bahwa program penyaluran Dana PNPMKP PUGAR ini ditujukan dan dialokasikan untuk mengatasi kendala kemampuan dan modal usaha pertanian garam. Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam usaha ini adalah masalah permodalan. Oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan modal usaha melalui berbagai bantuan alat-alat produksi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas garam. Dana bantuan PUGAR bermanfaat membantu masalah petani garam dalam hal permodalan dan meningkatkan produktivitas petambak garam di Desa Asempapan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya produksi garam dan pendapatan petambak garam setelah dilaksanakannya program tersebut. Dalam pelaksanaan Program Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR terdapat dua kendala yaitu kendala teknis dalam penyaluran dana bantuan dan kendala pengembangan usaha garam rakyat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, mekanisme penyaluran dana bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, memang pada tahap pengadaan dana bantuan, petambak garam tidak dilibatkan langsung, karena dalam tahap ini semua telah diakomodir oleh kementerian kelautan dan perikanan sebagai pembuat kebijakan, yaitu dengan adanya Peraturan Menteri kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor PER/06/Men/2012. Dalam mekanisme tersebut dijelaskan bahwa petambak garam diharuskan membuat proposal sebagai syarat untuk menerima bantuan tersebut, yang isinya mengenai keinginan petambak garam dalam memanfaatkan dana bantuan tersebut. Setelah itu proposal tersebut dikumpulkan secara kolektif oleh tim pendamping dan diserahkan ke tim pengawas untuk dikoreksi, dievaluasi dan selanjutnya disetujui oleh kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati. Dalam tahap pencairan dana bantuan ketua kelompok harus membuat rekening bank pada bank yang telah ditunjuk agar dana tersebut dapat langsung diterima oleh petambak garam secara utuh dan dimanfaatkan sendiri oleh para petambak garam di Desa Asempapan.

Manfaat yang dirasakan para petambak garam menurut survei dan wawancara dengan responden adalah terbantunya petambak garam untuk melakukan kegiatan produksi garam tanpa terhenti, ini disebabkan dana bantuan ini dipergunakan oleh petambak garam untuk membeli pompa air yang digunakan untuk mengalirkan air dari laut. Manfaat lain yang dirasakan petambak garam dari adanya bantuan Dana PNPM KP PUGAR ini adalah bertambahnya pendapatan para petambak garam, di mana total pendapatan tahun 2010 (sebelum ada bantuan) adalah sebesar Rp 1.471.555.000, kemudian pada tahun 2011 (sesudah ada bantuan) meningkat menjadi Rp 2.037.694.500. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petambak garam dapat meningkat akibat adanya bantuan PUGAR, karena penyaluran bantuan PUGAR di Desa Asempapan memang tepat sasaran dan merata.

Tesis tersebut sangat membantu dalam memahami bagaimana penyaluran bantuan program PUGAR yang tentu berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas garam yang dihasilkan petambak garam di Desa Asempapan, sehingga berpengaruh pula pada perekonomian petambak garam di Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Oleh karena itu Tesis tersebut dapat memberikan gambaran bagi penulis tentang bagaimana implementasi PUGAR di Desa Asempapan, apakah hal serupa juga terjadi di Kecamatan Batangan.

Perbedaan tesis karya Hariyanto dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini lebih fokus dalam mengungkap bagaimana pola hubungan

produksi pada usaha garam rakyat yang berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi petambak garam di Kecamatan Batangan. Hubungan produksi antara penggarap dengan pemilik lahan, penggarap dengan penggarap, petambak dengan tengkulak, akan dijelaskan lebih mendalam dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan membahas bagaimana implementasi bantuan PUGAR di Kecamatan Batangan, karena dalam implementasi PUGAR ada kaitannya dengan pola hubungan produksi antara petambak penggarap dengan pemilik lahan.

Pustaka yang ke tiga adalah skripsi karya Eka Wahyu Widodo yang berjudul “Struktur Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Tambak di Desa Lengkong, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati tahun 2003-2011”.<sup>25</sup> Dalam skripsinya tersebut ia membahas mengenai pola penguasaan dan distribusi sebaran penguasaan lahan tambak di Desa Lengkong hingga membentuk suatu struktur penguasaan lahan tambak oleh segelintir orang. Selain itu dalam skripsinya juga dibahas mengenai pengaturan dan pengelolaan lahan tambak, meliputi pengaturan peruntukkan lahan tambak, sewa-menyewa dan bagi hasil, jual beli lahan tambak dan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan tambak.

Pemerintah Kabupaten Pati melalui Perda No.4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Laut, melarang masyarakat pesisir Kabupaten Pati untuk membuka lahan tambak baru di sepanjang garis pesisir pantai dengan tujuan mengurangi dampak abrasi dari gelombang laut. Dengan diberlakukannya Perda tersebut hilang pula hak masyarakat untuk dapat membuka lahan tambak baru, yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat Desa Lengkong lebih memilih untuk melakukan kegiatan sewa-menyewa lahan tambak ataupun mengalihfungsikan lahan sawahnya menjadi lahan tambak.

Adapun sistem kepemilikan lahan tambak dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu *tambak suwunan*, *tambak warisan*, dan *tambak tukon*. Dalam sejarahnya, pola penguasaan lahan tambak di Desa Lengkong berasal dari *tambak suwunan* yang merupakan tanah milik perorangan yang dikuasai secara turun

---

<sup>25</sup>Eka Wahyu Widodo, “Struktur Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Tambak di Desa Lengkong, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati tahun 2003-2011”, (Skripsi pada Jurusan Sejarah FIB Undip, 2014).

temurun. Terdapat dua pelaku utama dalam usaha pertambakan di Desa Lengkong, yaitu para pemilik lahan tambak dan para buruh tambak yang melakukan hubungan sosial produksi dengan sistem bagi hasil baik secara majikan-buruh ataupun kekeluargaan dengan ikatan kepercayaan di antara masing-masing pihak.

Pola penguasaan lahan sangat terkait dengan stratifikasi sosial masyarakat pedesaan. Stratifikasi sosial masyarakat Desa Lengkong jika dilihat berdasarkan atas penguasaan lahan tambak (baik pemilikan secara individu, ataupun penguasaan efektif (sewa), dapat dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu: golongan petambak lahan luas, golongan petambak lahan sempit, dan buruh.

Skripsi tersebut sangat membantu dalam memahami bagaimana struktur penguasaan lahan tambak yang ternyata berkaitan erat dengan stratifikasi sosial masyarakat, di mana struktur penguasaan lahan tambak juga disinggung dalam penelitian ini. Namun demikian, penulis lebih memfokuskan pada permasalahan pola hubungan produksi pada usaha garam rakyat yang melibatkan beberapa pelaku usaha, yaitu pemilik modal dan buruh, di mana dalam kegiatan produksi garam pemilik modal merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan paling banyak, dan buruh merupakan pihak yang paling sedikit memperoleh keuntungan.

Pustaka yang keempat adalah tesis karya Nida Nurdiani dengan judul “Pola Kemitraan usaha Garam rakyat di Kabupaten Sumenep”.<sup>26</sup> Dalam tesis tersebut, ia mengungkap mengenai bagaimana karakteristik dari para pelaku usaha, menggambarkan mekanisme dari pola kerja sama yang ada, dan biaya-biaya yang dikeluarkan agar terciptanya pola kemitraan. Beberapa pelaku industri usaha garam yang ada di Kabupaten Sumenep, yaitu petambak garam, pengumpul (tengkulak), koperasi, industri kecil (UD. Rima Jaya) dan besar dalam pengolahan garam (PT. Garam Persero, PT. Budiono Bangun Persada, PT Garindo Sejahtera Abadi dan PT Susanti Megah). Bentuk kerja sama yang telah dilakukan dalam usaha garam rakyat di Kabupaten Sumenep adalah kerja sama antara PT Garam (Persero) dengan petambak garam dalam penyewaan lahan tambak garam,

---

<sup>26</sup>Nida Nurdiani, “Pola Kemitraan Usaha Garam rakyat di kabupaten Sumenep” (Tesis pada Magister Sains Program Studi Agribisnis IPB, 2013).

kerjasama antara penyewa lahan dengan petani penggarap, pola yang diterapkan sistem hasil 4:6, kerja sama antara petambak garam dengan pemilik lahan perorangan dengan sistem bagi hasil 4:6, dan kerja sama antara petambak dengan pedagang pengumpul.

Pola kerja sama yang dilakukan pemilik lahan dengan penggarap termasuk ke dalam pola kerja sama informal karena tidak adanya aturan yang dibuat secara tertulis antara pemilik lahan dengan penggarap, hanya menerapkan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak yang terlibat, sedangkan hubungan antara petambak garam dengan pedagang pengumpul dapat dikatakan sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena ketergantungan petambak garam terhadap pedagang pengumpul sangat tinggi. Hingga akhirnya keberadaan pedagang pengumpul sulit untuk dihilangkan. Pada dasarnya kerja sama yang terjalin ini dapat diperbaiki dengan membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga dapat membentuk pola kemitraan yang saling menguntungkan. Pola kemitraan antara petambak dengan pedagang pengumpul dapat dibangun dengan pola kemitraan informal. Keterbatasan dana yang dimiliki, menyebabkan petambak garam menjual hasil garamnya kepada pedagang pengumpul dengan sistem ijon. Sebagai konsekuensi dari pinjaman, petambak garam harus menjual garamnya kepada pedagang pengumpul. Selain masalah harga yang ditentukan secara sepihak oleh pedagang pengumpul, ada pula kecurangan yang dilakukan ketika perhitungan berat garam tidak sesuai ukuran karung yang digunakan. Semua pedagang pengumpul mengukur secara rata 1 ton sama dengan 20 karung, dengan asumsi berat 1 karung sama dengan 50 kilogram. Padahal kenyataannya, dalam 1 karung dapat mengisi 60-70 kilogram garam, tentu hal ini sangat merugikan petambak garam. Hubungan kerja antara petambak garam dengan pedagang pengumpul bersifat mengikat karena adanya pinjaman yang dilakukan oleh petambak garam, sehingga petambak garam tidak lagi memiliki kesempatan untuk memilih pedagang pengumpul yang lain.

Tesis tersebut sangat berguna bagi penulis untuk memahami bagaimana pola kemitraan antara pelaku-pelaku usaha garam rakyat. Tesis tersebut juga memberikan saran mengenai bagaimana sistem pola kemitraan antar para pelaku

agar semua pihak diuntungkan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai bagaimana pola hubungan produksi dalam usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan 1998-2014. Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkap apa saja akibat yang ditimbulkan dengan adanya pola hubungan produksi yang sudah terjalin bagi kehidupan sosial ekonomi petambak garam di Kecamatan Batangan 1998-2014.

Pustaka yang ke lima adalah skripsi karangan Uswatun Khasanah dengan judul “Perkembangan Usaha Garam Rakyat dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petambak Garam di Kabupaten Brebes Tahun 1998-2013”.<sup>27</sup> Dalam skripsinya tersebut ia membahas mengenai bagaimana keadaan garam rakyat di Kabupaten Brebes pada saat krisis moneter. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 1998 harga garam juga mengalami kenaikan sehingga hal ini berdampak positif bagi pendapatan petambak garam. Selain itu ia juga menjelaskan bagaimana sistem produksi garam rakyat di Kabupaten Brebes mulai dengan cara yang tradisional hingga menggunakan teknologi modern. skripsi tersebut juga menjelaskan mengenai tata niaga garam di Kabupaten Brebes yang diketahui masih monopolistik. Selain itu ia juga menjelaskan apa saja program pemerintah dalam upaya pemberdayaan usaha garam rakyat.

Usaha pergaraman yang telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Brebes tentunya berpengaruh terhadap pendapatan petambak garam di Kabupaten Brebes, diantaranya surplus pendapatan petambak pemilik, terbatasnya keuntungan petambak penggarap, nasib buruh dalam genggamannya pemodal, serta peluang usaha pembuat garam rebus.

Batasan waktu yang ia pilih adalah tahun 2013 karena tahun tersebut PUGAR memberikan bantuan teknologi ulir filter (TUF) kepada petambak garam di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Brebes. Dengan adanya teknologi TUF maka berdampak pada kualitas dan kuantitas petambak garam, sehingga hal

---

<sup>27</sup>Uswatun Khasanah, “Perkembangan Usaha Garam Rakyat dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petambak Garam di Kabupaten Brebes Tahun 1998-2013” (Skripsi pada Jurusan Sejarah FIB Undip, 2015).

tersebut dapat menjadi salah satu tolak ukur mengenai tinggi rendahnya pendapatan petambak garam.

Penelitian yang dilakukan oleh Uswatuh Khasanah tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena sama-sama mengkaji mengenai usaha garam rakyat yang diawali dengan masa krisis moneter yaitu pada tahun 1998, perbedaannya adalah ia lebih memfokuskan penelitian mengenai perkembangan usaha garam rakyat, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada permasalahan pola hubungan produksi pada usaha garam rakyat yang melibatkan beberapa pelaku usaha, diantaranya penggarap yang menempati posisi paling bawah dan sangat tergantung pada pemilik modal.

Beberapa pustaka yang telah disebutkan sangat relevan dengan penelitian ini. Kelima pustaka tersebut sangat membantu dalam merumuskan kerangka pikir penulis. Dengan menelaah beberapa pustaka tersebut, maka permasalahan dalam skripsi ini dapat dikaji secara kritis dan proposional.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Langkah yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu.<sup>28</sup> Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan secara analitis mengenai pola hubungan produksi usaha garam rakyat dan pengaruhnya bagi kehidupan sosial ekonomi petambak garam. Pada dasarnya segala sesuatu bisa mengalami perubahan dan perkembangan, termasuk pola hubungan produksi dalam usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati.

Pengaturan mengenai petambak garam terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang Terkena bencana Alam. Di dalam pasal 1 angka 3 didefinisikan dalam ketentuan umum bahwa petambak garam rakyat adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha

---

<sup>28</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1993), hlm. 2.

produksi garam sebagai penggarap penyewa lahan, penggarap bagi hasil (mantong), dan/atau pemilik lahan tambak garam dengan luasan tertentu yang mengerjakan lahan tambaknya sendiri. Menurut James Scott, petani adalah seorang pencocok tanam di pedesaan yang produksinya terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi keluarga.<sup>29</sup> Dalam hal ini, petambak garam tidak beda dengan petani yang dimaksudkan oleh James Scott. Istilah petani mengacu pada petambak garam di kecamatan Batangan baik petambak pemilik lahan luas, petambak pemilik lahan sempit, petambak penyewa, maupun petambak penggarap yang kesehariannya menggantungkan hidup dari hasil pertambakan.

Pola hubungan produksi antara pemilik lahan dan penggarap bagi hasil yang terjadi dalam usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan bersifat *patron client*. *Patron client* adalah hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosial ekonominya yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta menarik keuntungan-keuntungan dari seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (*client*).<sup>30</sup> *Client* kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada *patronnya*. Selain itu, pola hubungan produksi antara pemilik lahan dan penggarap terkesan ekspluitatif, terlebih pemilik lahan tidak menyediakan jaminan subsistensi yang cukup aman. Eksploitatif adalah suatu keadaan di mana individu, kelompok, atau kelas yang secara tidak adil atau secara tidak wajar menarik keuntungan dari kerja, atau atas kerugian orang lain.<sup>31</sup>

Popkin mengatakan bahwa petani adalah orang-orang yang rasional. Merekapun ingin menjadi kaya, seandainya mereka memiliki akses yang lebih

---

<sup>29</sup>Scott, *Moral Ekonomi Petani*, hlm. 238.

<sup>30</sup>Scott, *Perlawanan Kaum Tani* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm.7

<sup>31</sup>Lewis L. Lorwin, *Exploitation: Encyclopedia of the Social Sciences*, (New York: Macmillan, 1931), hlm. 16.

leluasa terhadap pasar.<sup>32</sup> Sama halnya dengan petambak di Kecamatan Batangan, mereka terkadang menimbun hasil produksi garamnya dan menjual ketika harga garam naik. Penimbunan hasil produksi garam dilakukan apabila tidak terdesak kebutuhan hidup.<sup>33</sup> Banyak kegiatan perekonomian yang dilakukan penggarap untuk bisa bertahan hidup. Tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi yang dimiliki penggarap, sehingga ia akan mengerjakan banyak pekerjaan hingga kebutuhan subsistensinya terpenuhi, diantaranya perubahan teknik bercocok tanam, membuat barang-barang kerajinan tangan, menjadi tukang, berjualan di pasar, dan sebagainya.<sup>34</sup> Sama halnya dengan petambak garam di Kecamatan Batangan. Pekerjaannya sebagai penggarap lahan tambak tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu mereka juga berprofesi sebagai kuli angkut, tukang *nggolok*, *ngedos* di sawah, dan tukang bangunan agar kehidupan subsistennya terpenuhi.<sup>35</sup>

Guna mempertajam analisis dalam mengkaji skripsi tentang pola hubungan produksi dalam usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, perlu digunakan berbagai pendekatan ilmu sosial, diantaranya sosiologi dan ekonomi yang saling berkaitan. Pendekatan sosiologi digunakan untuk mengetahui bagaimana kehidupan sosial petambak garam serta pola hubungan produksi antar pelaku usaha yang cenderung tidak setara, juga untuk mengungkap struktur sosial yang merupakan jaringan berbagai unsur seperti pemilik lahan maupun penggarap. Pendekatan ekonomi juga digunakan untuk menganalisis permasalahan yang merupakan bagian dari sejarah sosial ekonomi, meliputi kegiatan perekonomian dalam peranannya untuk meningkatkan taraf hidup dan

---

<sup>32</sup>Popkin, *Petani Rasional*, hlm. 20.

<sup>33</sup>Wawancara dengan Panggih, tanggal 5 Maret 2017.

<sup>34</sup>Scott, *Moral Ekonomi Petani*, hlm. 20.

<sup>35</sup>Wawancara dengan Rasidin pada 22 Januari, dan Panggih pada 5 Maret 2017.

kesejahteraan masyarakat.<sup>36</sup> Kondisi petambak garam belum menunjukkan kesejahteraan yang berarti, mengingat produksi garam masih dilakukan dengan pola tradisional, dan ketidakberdayaan petambak dalam menentukan harga juga sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraannya. Pendekatan ekonomi juga digunakan untuk menganalisis kondisi perekonomian petambak garam serta bagaimana pola hubungan produksi petambak garam yang berpengaruh bagi kehidupan ekonomi petambak garam.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka aktivitas yang dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>37</sup> Langkah pertama adalah heuristik yaitu tindakan guna mengumpulkan sumber-sumber penulisan yang relevan. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis dan sumber lisan melalui wawancara dengan informan. Wawancara antara lain dilakukan dengan penggarap bagi hasil, pemilik lahan luas dan sempit, tengkulak, dan makelar untuk mengetahui mengenai bagaimana pola hubungan produksi yang terjalin diantara mereka. Penggunaan metode ini disebabkan karena kesaksian sejarah tidak selamanya tersedia dalam bentuk tertulis.<sup>38</sup>

Data primer juga berasal dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Pati mengenai kondisi geografis, sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Batangan tahun 1998 sampai 2014. Sumber juga diperoleh dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang ketentuan impor garam, Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia mengenai penetapan penerima PUGAR, data dari Dinas Kelautan dan Perikanan mengenai luas tambak

---

<sup>36</sup>Rusian H. Prawira, *Ekonomi Sumber Daya* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 7.

<sup>37</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

<sup>38</sup>Abdurrahman Suryomiharjo, *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979), hlm. 49.

garam, jumlah petambak garam, dan total produksi garam di Kecamatan Batangan dari tahun 2011 sampai 2014, majalah Pati Bumi Mina Tani 2006-2008 mengenai kondisi petambak garam di Pati, pengentasan kemiskinan di kalangan petani dan petambak melalui program P2KP, rendahnya produksi garam di Kabupaten Pati, dan mengenai garam konsumsi beryodium. Selain itu penulis juga menemukan sumber dari koran Suara Merdeka dan Kompas. Data-data tersebut dapat menunjukkan bagaimana profil usaha garam rakyat yang terjadi di Kecamatan Batangan 1998-2014. Sementara itu sumber-sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka baik di Perpustakaan Daerah maupun di Perpustakaan Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Setelah sumber-sumber terkumpul, langkah selanjutnya adalah verifikasi atau penilaian sumber atau biasa disebut dengan kritik interen dan kritik eksteren. Kritik eksteren digunakan untuk menguji apakah sumber yang ditemukan merupakan sumber sejarah yang tepat, sedangkan kritik interen dilakukan untuk mengetahui apakah informasi dalam sumber yang ditemukan valid atau tidak. Diperlukan kehati-hatian dalam menghadapi laporan atau berita dalam surat kabar, karena kadang-kadang terjadi pemutarbalikan fakta, pengabaian fakta penting, dan penggambaran kejadian secara berlebihan demi menarik perhatian pembaca.<sup>39</sup> Untuk itu, penulis berupaya membanding-bandingkan sumber-sumber tertulis dan wawancara guna memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tahap berikutnya adalah interpretasi yaitu sebuah langkah menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh melalui sumber sejarah yang telah berhasil dikumpulkan dengan cara menyeleksi, menyusun, memberi atau mengurangi penekanan, dan menata fakta-fakta itu ke dalam urutan tertentu.<sup>40</sup> Hal ini perlu dilakukan karena sering kali fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah belum menunjukkan suatu kebulatan yang bermakna dan baru merupakan

---

<sup>39</sup>Sartono kartodirdjo, *Pendekatan ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 108.

<sup>40</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 144.

kumpulan fakta yang tidak saling berhubungan.<sup>41</sup> Dalam hal ini penulis dapat menghubungkan fakta dan imajinasi untuk menjelaskan bagaimana profil usaha garam rakyat serta pola hubungan produksi dalam usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan.

Langkah terakhir adalah historiografi. Dalam tahapan ini penulis menyajikan cerita sejarah yang kronologis dan berdasarkan fakta. Tujuannya agar mampu menggabungkan fakta-fakta sejarah yang terpisah sehingga rangkaian peristiwa masuk akal dan dapat mendekati kebenaran menjadi sebuah peristiwa sejarah yang sungguh terjadi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi yang berjudul “Pola Hubungan Produksi dalam Usaha Garam Rakyat dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Petambak Garam di Kecamatan Batangan 1998-2014” ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan.

Pada bab I pendahuluan yang terdiri dari enam subbab, yaitu latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai gambaran umum Kecamatan Batangan Kabupaten Pati 1998-2014 yang meliputi diskripsi geografis, demografis, sosial ekonomi, dan sosial budaya.

Bab III membahas mengenai perkembangan usaha garam rakyat di kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun 1998-2014. Subbab pokok bahasan meliputi struktur penguasaan lahan, proses produksi serta implementasi program PUGAR. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai tata niaga garam rakyat di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati selama rentang waktu 1998-2014.

Bab IV membahas mengenai pola hubungan produksi dalam usaha garam rakyat dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi petambak garam

---

<sup>41</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2005), hlm. 101-104.

tahun 1998-2014. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai sistem bagi hasil, akumulasi surplus pemilik lahan, dan kemiskinan petambak penggarap bagi hasil.

Bab V membahas mengenai simpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.